

MOTIVASI SWISS MELAKUKAN REFERENDUM IMIGRASI PADA TAHUN 2014

Oleh: Vemby¹
Irwan Iskandar S.IP, MA²
Email : vembydnc17@gmail.com
Contact Person : +6285275492852

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research explains about motivation of Switzerland for a referendum as an effort to limit immigration and keeping national's security balance in 2014. Switzerland as the heart of Europe had agreement with European Union about Free Movement on Persons that will be the main reason of increasing immigrant and asylum seekers. Switzerland have long connection with immigrant and asylum seekers who have contribute and support for national economy. This research has been built by neo-realism perspective on International Relations and support by securitization and migration theories, and also concept of referendum. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative descriptive methods. Scope of this research is Switzerland's immigration referendum in 2014. This research found that immigrant and asylum seekers threaten Switzerland's security in many ways. This result shows that Switzerland fear about arising of criminality and highly social assistance that government spend for immigrant and asylum seekers. Immigration referendum is a result from people's want to limit immigration because their negative effect, also spreading of xenophobia and islamophobia in Switzerland. The main motivation of immigration referendum is to maintain security the security of Switzerland who were disturbed by the presence of immigrant and asylum seekers.

Keyword : referendum, immigration, security, securitization of migration

¹ Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Angkatan 2013

² Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

Pendahuluan

Keberhasilan Swiss menjadi salah satu negara maju serta peranannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional membuat masalah imigrasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.³ Sejak berlakunya perjanjian kebebasan bergerak pada tahun 2002, Swiss menjadi tujuan populer bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dikarenakan penetapan tarif pajak yang relatif rendah. Hal ini juga membuka peluang imigran dan pencari suaka untuk memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih layak di Swiss.

Swiss harus menghadapi banyak masalah yang sama seperti tetangganya, dari melonjaknya jumlah aplikasi suaka hingga masalah integrasi dan meningkatnya sentimen anti-asing. Seperti negara Eropa lainnya, Swiss mengetahui bahwa kebijakan imigrasi lebih lanjut akan diperlukan untuk mengkompensasi populasi yang semakin banyak dan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di masa depan.⁴

Menurut laporan International Migration Outlook 2014, Swiss merupakan negara dengan jumlah imigran permanen per kapita terbesar pada tahun 2012. Sebagian besar penyumbang imigran berasal dari

negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Portugal, dan Italia.⁵ Swiss juga menjadi rumah bagi para imigran yang berasal dari Balkan, Asia, dan Afrika untuk mencari perlindungan suaka.

Referendum yang dilaksanakan Swiss pada 9 Februari 2014 telah mendukung inisiatif untuk memberlakukan kuota tahunan imigrasi. Hasil referendum akan diimplementasikan ke dalam hukum Swiss pada Februari 2017 yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah sistem baru berdasarkan pada batas kuantitatif dan kuota imigrasi negara, termasuk mobilitas warga negara dari negara-negara anggota Uni Eropa.⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah migrasi, sekuritisasi, serta konsep referendum. *The Copenhagen School* mendefinisikan migrasi sebagai ancaman keamanan masyarakat dalam sebuah tatanan masyarakat yang berlebihan dengan kedatangan orang asing di wilayah mereka. Sementara itu, sekuritisasi adalah suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada. Teori sekuritisasi muncul untuk merespon kegagalan teori

³ Lucia H.Rustam, *Indonesia-Swiss : Potensi dan Prospek*, 09 April 2008, tersedia di www.kemlu.go.id diakses pada 07 Mei 2015

⁴ Denise Efonayi, Josef Martin Niederberger, and Philippe Wanner. *Switzerland Faces Common European Challenges*. 1 Februari 2005. Migration Information Source, tersedia di <http://www.migrationpolicy.org/article/switzerland-faces-common-european-challenges> diakses pada 21 Januari 2016

⁵ *Switzerland has highest number of immigrant*, 01 Desember 2014, tersedia di http://www.swissinfo.ch/eng/migration-outlook_switzerland-has-highest-number-of-immigrants/41145410 diakses pada 23 Oktober 2015

⁶ Carrera, Guild & Eisele, *No Move Without Free Movement : The EU-Swiss controversy over quotas for free movement of person*, 2015, CEPS Policy Brief No.331, Brussel

keamanan tradisional dalam memahami keamanan itu sendiri.⁷

Stephen Tierney mengidentifikasi referendum dalam tiga hal utama: Pertama, bahwa referendum dipakai untuk mendefinisikan kontrol elit dan dimanipulasi oleh penyelenggara referendum. Referendum secara luas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tujuan politik dan hanya diadakan ketika memiliki prospek hasil yang sukses (dari sudut pandang pemerintah). Kedua, penalaran publik memungkinkan untuk refleksi informasi dan diskusi ide sebelum keputusan dicapai menghilangkan dari proses referendum. Ketiga, referendum mengkonsolidasikan dan merupakan contoh sederhana mayoritas pengambilan keputusan mengorbankan kepentingan minoritas dan individu.⁸

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Adapun tujuan dari penggunaan metode deskriptif analitis ini adalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Teknik pengumpulan data

penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan literatur atau *library research* dalam hal ini pengumpulan data dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. Data-data dalam hal ini merupakan data sekunder berupa jurnal, majalah, surat kabar cetak dan *online*, buku, artikel internet dan sebagainya. Selain itu data penelitian juga diperoleh melalui *browsing* internet yang meliputi situs-situs *website* resmi, seperti; situs resmi milik pemerintah, universitas atau lembaga survey dan sebagainya.

Kondisi Imigran dan Pencari Suaka di Swiss

Sebagai negara kecil yang terletak di persimpangan Utara dan Selatan Eropa, Swiss secara luas dikenal karena netralitas dan sikap damai, keragaman etnis dan bahasa dan desentralisasi pemerintahan yang membuat sebagian besar hukum di level kanton (atau negara). Swiss merupakan contoh kasus yang menarik untuk membahas tentang pertumbuhan imigran dan pencari suaka di sebuah negara. Kebijakan mengenai imigran dan pencari suaka secara signifikan berubah di Swiss sejak gelombang pertama imigrasi pada abad ke-19 hingga saat ini. Beberapa kejadian telah mempengaruhi perubahan tersebut diantaranya : terjadinya Perang Dunia 1 dan 2, munculnya rezim komunis, peningkatan pengungsi selama tahun 1990-an, serta bangkitnya perekonomian negara Swiss.

Swiss merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tengah yang memiliki masalah dengan angka pertumbuhan penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kedatangan para imigran dan pencari suaka yang

⁷ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap deWilde. *Security - A New Framework for Analysis*. 1998. London : Lynne Rienner. Hal.48

⁸ Stephen Tierney, *The Referendum in Multi-level States: Fracturing or Fostering Federal Models of Government?*, 2014, The Federal Idea: Edinburg, Hal.8-9

meningkat sejak masa perang sehingga mempengaruhi jumlah populasi yang ada. Tingginya kebutuhan tenaga kerja dalam industri memberikan peluang besar bagi imigran dan pencari suaka untuk bekerja di Swiss. Permintaan tenaga kerja ini mendorong pemerintah Swiss untuk melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dalam hal pergerakan tenaga kerja melalui Perjanjian *Free Movement on Persons* dan Perjanjian Schengen.

Perjanjian pergerakan bebas antara Swiss dan Uni Eropa menyebabkan pergerakan imigrasi dari Uni Eropa mencapai lebih dari 1 juta orang dimana 230.000 orang merupakan para pekerja imigran. Di lain pihak, warga Swiss yang melakukan imigrasi ke wilayah Uni Eropa sekitar 430.000 orang. Hingga akhir tahun 2014, sebanyak 1.324.000 warga EU telah terdaftar sebagai imigran di Swiss sebagai dampak dari perjanjian FMP.⁹

Pemberlakuan Schengen Area dan Sistem Dublin memberikan kemudahan bagi imigran dan para pencari suaka untuk masuk ke Swiss tanpa memakai visa. Hal ini terlihat dari meningkatnya aplikasi suaka sebanyak 45% pada tahun 2011 yang merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2002. Terhitung sebanyak 36,5% yang ditangani oleh pemerintah Swiss pada tahun 2011.

Kehadiran para imigran dan pencari suaka juga memunculkan banyak pandangan di dalam masyarakat Swiss sendiri. Sebagian masyarakat menganggap kehadiran imigran dan pencari suaka adalah wajar, namun sebagian lainnya menganggap mereka sebagai hal

yang merugikan negara. Dilihat dari segi keamanan, imigran dan pencari suaka dapat dihubungkan dengan terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba, dan kejahatan berat lainnya. Masuknya imigran dan pencari suaka di Swiss membuat pemerintah semakin memperketat kontrol perbatasan untuk menghindari kejahatan lintas batas.

Diskriminasi dan pelanggaran juga banyak terjadi terhadap para imigran dan pencari suaka terutama yang berasal dari Eropa Timur dan negara-negara muslim. Diskriminasi ini semakin parah setelah terjadinya kejadian terorisme di beberapa negara Eropa. Dinamika diskriminasi dan kontradiksi terhadap imigran dan pencari suaka menjadi isu migrasi yang diperbincangkan di tingkat internasional. Contohnya yaitu perang Suriah yang saat ini tengah berlangsung yang memberikan dampak secara tidak langsung yaitu munculnya imigran missal yang mencari suaka ke Swiss.

Ancaman Stabilitas Keamanan Swiss

Peningkatan jumlah kedatangan imigran dan pencari suaka yang cukup signifikan setiap tahunnya menimbulkan masalah tersendiri bagi keamanan negara Swiss. Keterbukaan Swiss dalam menerima kedatangan imigran dan pencari suaka sejak diberlakukannya perjanjian *Free Movement on Person* dan Sistem Dublin memberikan peluang baru bagi mereka untuk masuk dengan mudah ke Swiss. Lonjakan tajam kedatangan imigran dan pencari suaka terjadi pada dua tahun terakhir sebelum dilakukannya referendum imigrasi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada

⁹ *EU relations with Switzerland*, tersedia di http://eeas.europa.eu/switzerland/index_en.htm diakses pada 23 Oktober 2015

tahun 2012 yang merupakan skala terbesar sejak kedatangan imigran di tahun 2002. Oleh sebab jumlah peningkatan tersebut Swiss mulai merasa khawatir dengan stabilitas keamanan negaranya.

Pada tahun 2010, statistik daftar kejahatan berdasarkan kewarganegaraan diterbitkan. Untuk menghindari distorsi karena struktur demografis, hanya penduduk laki-laki antara 18 dan 34 tahun yang digunakan untuk setiap kelompok. Dari penelitian ini, terlihat jelas bahwa tingkat kejahatan sangat berkorelasi dengan negara asal dari berbagai kelompok imigran. Imigran yang berasal dari Jerman, Perancis dan Austria memiliki tingkat kejahatan secara signifikan lebih rendah dari warga negara Swiss, sementara imigran dari Angola, Nigeria dan Aljazair memiliki tingkat kejahatan sekitar 600% dari populasi Swiss. Diantaranya yang paling ekstrim adalah imigran dari bekas Yugoslavia, dengan tingkat kejahatan antara 210% dan 300% dari nilai Swiss.¹⁰

Terdapat berbagai alasan mengapa kriminalitas dilakukan oleh imigran dan pencari suaka. Diantaranya karena struktur populasi imigran dan pencari suaka, kondisi sosial, perbedaan budaya, perubahan keadaan, dan lain sebagainya. Imigran yang berasal dari luar Eropa, biasanya memiliki kualifikasi yang buruk sehingga memiliki kesempatan yang rendah dalam mendapatkan pekerjaan. Sementara itu pencari suaka tidak diperbolehkan untuk bekerja di Swiss dan hanya memanfaatkan bantuan sosial.

¹⁰ [Veronika Ulbricht. *Kriminalitt in der Schweiz*. 03 January 2016. Diakses melalui <http://mussenstellen.com/article/kriminalit-t-in-der-schweiz> pada 06 November 2016](http://mussenstellen.com/article/kriminalit-t-in-der-schweiz)

Pemberlakuan perjanjian Schengen juga mengurangi kontrol keamanan di perbatasan sehingga memberikan kesempatan bagi organisasi kriminal untuk berkembang di Swiss.

Lebih dari separuh penduduk Swiss memiliki xenophobia menurut sebuah survei yang diterbitkan pada bulan Juni 2006 yang mengukur perkembangan sikap xenophobia dan ekstremis sayap kanan. Selama kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Rasisme, Doudou Diène, pada bulan Januari 2006, melaporkan bahwa Swiss menderita rasisme, diskriminasi dan xenophobia. Diène mengatakan bahwa rasisme merupakan hal yang disepelkan, terutama di kalangan politik. Politik Swiss dan perdebatan publik ditandai dengan pembahasan tentang isu asing, perlakuan terhadap asing, definisi tentang asing, dan kebijakan yang berkaitan dengan mereka.¹¹

Islamophobia muncul sebagai salah satu faktor yang dibahas di ruang sosial dan politis di Swiss. Peristiwa yang menggambarkan institusionalisasi dari Islamophobia dan rasisme struktural di Swiss telah terjadi dalam beberapa fenomena. Pelarangan terhadap adanya menara, jilbab, niqab (selubung wajah) dan ketakutan yang tumbuh terhadap agama Islam sebagai respons atas kejahatan kelompok radikal dan terorisme menghasilkan stigma agama melalui strategi anti jihad. Hal ini memberikan dampak meningkatnya diskriminasi terhadap pemeluk agama islam dan

¹¹ [Information Platform humanrights.ch. *Racism is also reality in Switzerland*. 30 Desember 2015. Diakses melalui <http://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/racism/studies/racism-a-reality-switzerland-4552> pada 03 November 2016](http://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/racism/studies/racism-a-reality-switzerland-4552)

menjauhkan mereka dari masyarakat Swiss.

Terdapat anggapan umum bahwa imigrasi memiliki korelasi dengan partai sayap kanan. Munculnya partai-partai ini berkaitan dengan peningkatan jumlah imigran dan pencari suaka yang memicu sikap anti-imigran yang kemudian menjadi menonjol dan relevan secara politik. Pada tahun 2011 partai sayap kanan, Swiss People Party (SVP) memutuskan untuk meluncurkan inisiatif baru yang pada dasarnya menentang pergerakan bebas orang dan imigrasi. Inisiatif SVP ini dipicu sentimen anti-asing dan sikap konservatif terhadap pertumbuhan penduduk serta kecemasan penduduk kelas menengah. Partai Rakyat Swiss (SVP) berpendapat bahwa imigran dan pencari suaka yang pergi ke Swiss hanya untuk mengklaim tunjangan kesejahteraan dan perumahan bersubsidi.

Pendukung inisiatif ini menyalahkan peningkatan besar dalam imigrasi yang berdampak terhadap pengangguran yang lebih tinggi (8% dengan orang asing), kemacetan lalu lintas, kenaikan sewa rumah, hilangnya lahan, tekanan pada gaji, kriminalitas asing, penyalahgunaan suaka dan sejumlah besar bantuan kesejahteraan terhadap orang asing. Imigrasi yang tidak terkontrol menurut pendukung inisiatif ini, mengancam kebebasan Swiss, keamanan, kesempatan kerja penuh, keindahan alam dan kemakmuran Swiss. Dalam menyajikan inisiatif ini, mereka menekankan bahwa hal tersebut tidak akan 'membekukan' imigrasi atau mengakhiri perjanjian bilateral dengan Uni Eropa.

Pergerakan bebas orang tidak hanya membawa banyak pekerja

asing ke Swiss tetapi juga menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pada tahun 2012 di Swiss terdapat 250.333 orang asing yang menerima tunjangan kesejahteraan sosial. Imigran menjadi subjek yang paling rentan terhadap kehilangan pekerjaan karena mereka biasanya memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih rendah. Menurut Kantor Statistik Federal, pada tahun 2012 tingkat klaim kesejahteraan sosial penduduk asing adalah 6,3%, dibandingkan dengan 2,6% warga Swiss.

Referendum Imigrasi Swiss

Referendum imigrasi merupakan inisiatif populer yang diajukan oleh Swiss People's Party (SVP) yang menginginkan terjadinya perubahan peraturan imigrasi dengan membatasi kuota imigrasi sesuai dengan kepentingan ekonomi Swiss. Beberapa kelompok kepentingan juga menolak inisiatif populer tersebut. Menurut federasi bisnis *Economiesuisse*, pembatasan imigrasi dapat mengancam perjanjian bilateral antara Swiss dengan Uni Eropa. Selain itu hal ini juga dapat mengancam kesempatan kerja bagi warga Swiss dan terutama bagi perekonomian Swiss. Hal ini disebabkan Uni Eropa merupakan mitra ekonomi utama bagi Swiss.¹² *Swiss National Science Foundation* juga menolak inisiatif ini dengan alasan bahwa kerjasama pendidikan, penelitian, dan teknologi Swiss

¹² *Wirtschaft lehnt SVP Initiative geschlossen ab*, 14 Februari 2012, *Economiesuisse*, diakses melalui http://www.economiesuisse.ch/de/PDF/%20Download%20Files/20120214_MM_Zuwanderung.pdf pada 02 Desember 2016

dengan Uni Eropa juga akan terancam batal. Hal ini dikarenakan dalam paket perjanjian Bilateral 1, sektor pendidikan dan penelitian menjadi salah satu butir perjanjian. Selain itu, pelaksanaan inisiatif ini akan mengancam partisipasi Swiss dalam Horizon 2020 dan Erasmus+.

Penerimaan inisiatif populer mengalami reaksi yang berbeda di kalangan parlemen dengan masyarakat Swiss. Hal ini terbukti dengan ditolaknya inisiatif populer tersebut pada pengambilan suara di tingkat dewan nasional dan dewan negara dengan hasil 128 suara berbanding 49 suara pada Dewan Nasional dan 34 suara berbanding 6 suara pada Dewan Negara pada 14 Februari 2012. Presiden Konfederasi Swiss, Didier Burkhalter, secara pribadi telah menyatakan secara tegas bahwa negaranya "selalu tergantung pada tenaga kerja asing", yang juga memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan negara. Selanjutnya Presiden Konfederasi Swiss juga menyatakan bahwa inisiatif tersebut bisa membahayakan beberapa perjanjian bilateral dengan negara-negara Eropa.

Swiss merupakan negara yang terkenal dengan sistem demokrasi partisipatif atau demokrasi plebisit, di mana warga negara dapat mengajukan permohonan apapun melalui hukum referendum, dengan memulai mengumpulkan petisi sebanyak 100.000 tanda tangan. Pada 1990-an, pengawasan terhadap sistem imigrasi dan suaka Swiss meningkat, masyarakat beralih ke sistem referendum dalam upaya untuk mempertahankan status quo dan menjaga imigran dan pencari suaka dari Timur dan Selatan agar tidak masuk ke dalam Swiss. Terdapat

lima belas referendum yang telah dilaksanakan mengenai masalah imigrasi dan suaka sejak tahun 1999.

Jumlah pemilih referendum imigrasi Swiss adalah 5.211.426 orang dengan pemilih Swiss yang berada di luar negeri sebanyak 137.480 orang. Jumlah kertas suara yang diterima yaitu sebanyak 2.948.156 atau 56,57% kertas suara dimana kertas suara yang sah berjumlah 2.908.406 kertas suara. Referendum imigrasi memenangkan inisiatif populer dengan total jumlah suara sebanyak 1.463.854 dukungan suara atau 50,3%. Kemenangan inisiatif populer ini juga didukung oleh jumlah suara kanton yaitu sebesar 12 5/2 suara.

Penerimaan inisiatif populer "Stop Imigrasi Massal" datang dari masyarakat Swiss bagian Tengah dan Swiss bagian Timur. Dukungan suara terbesar berasal dari kanton Ticino dengan 68,2% suara. Sementara itu penolakan mencapai 60% suara berasal dari Vaud (61,07%), Jenewa (60,9%) Neuchâtel (60,7%), Jura (55,9%), Valais (51,7%) dan Freiburg (51,5%). Masyarakat Swiss yang berbahasa Perancis selain kanton Berne juga ikut menolak inisiatif populer "Stop Imigrasi Massal" tersebut. Perbedaan pendapat terjadi pada wilayah Swiss yang berbahasa Jerman dimana hanya kanton Zurich dan Zoug yang memilih menolak inisiatif populer tersebut.

Sebagai bentuk respon terhadap hasil referendum tersebut, Uni Eropa secara resmi mengirimkan surat peringatan kepada Swiss terkait kerjasama yang telah disepakati. Surat resmi yang dikirim pada 24 Juli 2014 oleh perwakilan tinggi Uni Eropa, C. Ashton menyatakan bahwa

"hasil referendum tersebut sangat berlawanan dengan perjanjian yang ada dan Uni Eropa tidak menyetujui hasil referendum tersebut." Referendum imigrasi pada Februari 2014 merupakan ancaman serius bagi hubungan Uni Eropa-Swiss. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada FMP tetapi juga beresiko pada seluruh rangkaian perjanjian Bilateral I dengan Uni Eropa, terutama mengenai Pasar Tunggal. Dewan Federal Swiss mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah politik dan hukum yang dihasilkan oleh referendum tersebut. Di satu sisi, Swiss harus melaksanakan ketentuan konstitusi baru pada bulan Februari 2017, sedangkan di sisi lain, Swiss harus mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan dengan Uni Eropa. Sementara Uni Eropa menolak renegotiasi FMP (dengan maksud untuk memperkenalkan kuota dan preferensi nasional) serta konsultasi tentang cara memecahkan masalah tersebut terus berlangsung secara informal antara Komisi Uni Eropa dan otoritas Swiss.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dan berbagai referensi yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa imigran dan pencari suaka telah menjadi perdebatan publik yang belum selesai selama bertahun-tahun. Mereka datang ke Swiss sejak dalam jangka waktu yang sangat lama dan telah berkontribusi dalam banyak bidang di Swiss. Imigran terbesar yang datang ke Swiss berasal dari Jerman, Perancis, dan Italia. Sementara pencari suaka kebanyakan berasal dari

luar Eropa seperti Eritrea, Somalia, dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik.

Kedatangan imigran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Swiss sehingga menyebabkan banyaknya diskriminasi yang terjadi. Selain itu, peningkatan imigrasi semakin memperbesar xenophobia dan islamophobia di kalangan masyarakat Swiss sehingga menimbulkan desakan terhadap pemerintah untuk membatasi kedatangan mereka. Swiss menjadi negara tujuan imigrasi tertinggi di Eropa selama abad 20. Hal ini dikarenakan daya tarik bagi imigran dan pencari suaka terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.

Pemberlakuan perjanjian FMP menjadi penyebab utama peningkatan imigrasi di Swiss. Hal ini juga berdampak negatif dengan meningkatnya kriminalitas oleh imigran dan pencari suaka serta penyalahgunaan bantuan sosial yang diberikan kepada mereka. Pemerintah Swiss menghabiskan dana yang sangat besar dalam mengelola imigran dan pencari suaka setiap tahunnya. Desakan masyarakat untuk membatasi imigran dan pencari suaka difasilitasi oleh *Swiss People's Party* yang juga merupakan partai pendukung anti imigran di Swiss. Inisiatif anti-imigrasi ini sebagian besar didukung oleh masyarakat Swiss yang berbahasa Italia. Sementara penolakan berasal dari masyarakat Swiss berbahasa Perancis dan Jerman.

Swiss telah melaksanakan referendum pada tanggal 9 Februari 2014 dengan hasil referendum yakni 50,3 persen masyarakat Swiss menyatakan mendukung pembatasan imigrasi misal dan 49,7 persen

menyatakan menolak. Hal ini berarti bahwa pemerintah Swiss harus mengadopsi inisiatif populer tersebut ke dalam kebijakan nasional dalam jangka waktu 2 tahun. Uni Eropa dan beberapa mitra kerja Swiss lainnya menolak hasil referendum tersebut. Hal ini juga berdampak dengan kerjasama Swiss dengan Uni Eropa dan beberapa mitra kerja lainnya.

Peningkatan imigrasi menghilangkan kontrol pemerintah terhadap keamanan non-tradisional yang ada di Swiss sehingga menimbulkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat Swiss. Tidak terkontrolnya imigrasi juga menyebabkan imigran dan pencari suaka lebih leluasa melakukan tindak kriminal di negara tersebut. Pelaksanaan referendum imigrasi Swiss adalah pembuktian bahwa kedaulatan rakyat masih menjadi kekuasaan tertinggi yang ada di Swiss. Meskipun pihak pemerintah telah menyarankan untuk menolak inisiatif populer “Stop Imigrasi Massal” tersebut, namun keputusan masyarakat Swiss yang dihasilkan melalui tetap harus ditaati oleh pemerintah Swiss.

Daftar Pustaka

- Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap deWilde. *Security - A New Framework for Analysis*. 1998. London : Lynne Rienner. Hal.48
- Carrera, Guild & Eisele, No Move Without Free Movement : The EU-Swiss controversy over quotas for free movement of person, 2015, CEPS Policy Brief No.331, Brussel
- EU relations with Switzerland*, tersedia di http://eeas.europa.eu/switzerland/index_en.htm diakses pada 23 Oktober 2015
- Denise Efiyoni, Josef Martin Niederberger, and Philippe Wanner. *Switzerland Faces Common European Challenges*. 1 Februari 2005. Migration Information Source. Tersedia di <http://www.migrationpolicy.org/article/switzerland-faces-common-european-challenges> diakses pada 21 Januari 2016
- Information Platform humanrights.ch. *Racism is also reality in Switzerland*. 30 Desember 2015. Diakses melalui <http://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/racism/studies/racism-a-reality-switzerland-4552> pada 03 November 2016
- Lucia H.Rustam. *Indonesia-Swiss : Potensi dan Prospek*. 09 April 2008. Tersedia di www.kemlu.go.id diakses pada 07 Mei 2015
- Stephen Tierney, *The Referendum in Multi-level States: Fracturing or Fostering Federal Models of Government?*, 2014, The Federal Idea: Edinburg, Hal.8-9
- Switzerland has highest number of immigrant*, 01 Desember 2014, tersedia di http://www.swissinfo.ch/eng/migration-outlook_switzerland-has-highest-number-of-immigrants/41145410 diakses pada 23 Oktober 2015
- Veronika Ulbricht. *Kriminalitt in der Schweiz*. 03 January 2016. Diakses melalui <http://mussenstellen.com/article/kriminalitt-in-der-schweiz> pada 06 November 2016
- Wirtschaft lehnt SVP Initiative geschlossen ab*, 14 Februari 2012, Economiesuisse, diakses melalui

[http://www.economiesuisse.ch/de/
PDF%20Download%20Files/201
20214_MM_Zuwanderung.pdf](http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/20120214_MM_Zuwanderung.pdf)
pada 02 Desember 2016